

KOMUNIKASI KEBANGSAAN: MEMAHAMI RELASI KEBANGSAAN DENGAN BENTUK NEGARA KESEJAHTERAAN

Cevi Mochamad Taufik¹, Dono Darsono²

¹Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, cevimochamadtaufik@ukri.ac.id

²Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati, donodarsono2727@gmail.com

Abstract: *Realizing welfare as the ultimate goal of the state still requires a long struggle. The collective experience of the nation in manifesting welfare has been marked by various events that led to deviations from national ideals. Fundamental disruptions have occurred, each with broad and profound impacts. The emergence of foreign agents seeking to blur and alter the nation's ideology and aspirations, the formalization of Pancasila, authoritarian leadership that tended to align with the axis of certain states, the rise of oligarchy, and political streams that diverted the nation's struggle to achieve the ideal of welfare, all became part of these challenges. These events represent episodes in the nation's journey to uphold Indonesia as an independent, strong, and prosperous nation. Based on these considerations, this study aims to examine the practice of national communication in the effort to achieve a welfare state. The method used in this research is qualitative, emphasizing data analysis drawn from media sources and other documents. The findings show that national communication can serve as an essential aspect in building commitment toward realizing the ideals of a welfare state.*

Keyword: *communication, nationalism, constitutional mandate ideals, welfare state*

Abstrak. Mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir bernegara masih memerlukan perjuangan panjang. Pengalaman kolektif bangsa dalam memmanifestasikan kesejahteraan diwarnai berbagai peristiwa yang mengarah pada penyimpangan cita-cita nasional. Terjadi gangguan-gangguan fundamental dengan pengaruhnya yang sangat luas. Kemunculan agen asing yang berusaha mengaburkan dan mengubah ideologi dan cita-cita kebangsaan, Pancasila yang diformasilisasikan, kepemimpinan otoriter dan cenderung berhaluan pada poros negara tertentu, terbentuknya oligarkhi, sampai aliran-aliran politik yang menjauhkan perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Peristiwa-peristiwa ini menjadi episode perjalanan bangsa dalam menegakkan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, kuat, dan sejahtera. Berdasarkan atas paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik komunikasi kebangsaan dalam menuju terciptanya negara kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menekankan pada jenis analisis data yang bersumber dari media serta berbagai dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebangsaan dapat menjadi aspek dalam membangun komitmen dalam mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan.

Kata Kunci: komunikasi, kebangsaan, amanat konstitusi, cita-cita, negara kesejahteraan

PENDAHULUAN

Komitmen mewujudkan negara kesejahteraan baru kali ini dikomunikasikan secara luas dan terbuka. Keterbukaan ini membedakan cara paradigma baru pengelolaan pemerintahan yang membedakan dengan pengelolaan dengan pemerintahan sebelumnya. Kesejahteraan yang merupakan amanat konstitusi wajib dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Ginting et al., 2025). Kerangka negara kesejahteraan sebagai sebuah konsep yang mengarahkan negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan warga melalui jaminan sosial, pelayanan, perlindungan, dan pencegahan masalah sosial.

Ini mencakup peran aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan, bukan hanya menjaga keamanan. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat miskin (Libra & Fauzan, 2023). Pendekatan ini dapat direalisasikan melalui program dan kebijakan yang prorakyat. Ini agar kondisi sejahtera yang menurut Magrabi et al. (1991) sebagai suatu keadaan yang sehat, nyaman dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan (Enita Puspita Sari & Ayu Pratiwi, 2018).

Kesejahteraan dalam konsep modern diartikan sebagai keadaan bagi seseorang di mana seseorang dapat mencukupi kebutuhan pokok, baik pangan, sandang maupun papan, dapat mengakses pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, tersedianya air bersih yang mampu mengangkat kualitas kehidupannya pada kedudukan sosial seseorang yang sepadan (Syahrin et al., 2022).

Berdasarkan perspektif tersebut, pencapaian kondisi sejahtera dapat dinisbatkan pada bentuk kekayaan bersifat materiil-spirituil. Persebaran kekayaan sebagai fasilitas yang memudahkan pada upaya-upaya perwujudan kesejahteraan masih belum merata (Siregar et al., 2025). Kekayaan berlimpah yang terdapat di bumi, laut, dan udara yang sebenarnya dapat digunakan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, namun yang terjadi kekayaan dikuasai kelompok kecil orang.

Kondisi ini memnbuat Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar terkaget-kaget. Secara lebih jelas Muhaimin mengungkapkan bahwa orang terkaya di Indonesia menguasai hampir separuh total kekayaan nasional. "Kita mendapati bahwa 1 persen orang terkaya di negeri ini menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional kita," katanya. (okezone.com).

Iniilah ironisme di negara kaya raya dengan sumber daya melimpah. Salah satu penyebab ketimpangan yang terjadi karena kebijakan negara hanya menitikberatkan pada pengumpulan modal secara besar-besaran, menyebabkan monopoli kekayaan, sehingga dikuasai beberapa orang saja, dan melupakan kepentingan sosial masyarakat (Zakiyah & Widiastuti, 2017).

Pemerataan dan distribusi kekayaan bagi kesejahteraan rakyat tertuang dalam Pembukaan UUD-1945 dengan kesanggupan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia (Pambudi, 2018). Perwujudannya dapat dilakukan melalui berbagai langkah dari keadilan ekonomi, pendidikan dan kesehatan berkualitas, sistem jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan kerangka dasar dalam membentuk konsep negara kesejahteraan sebagai gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan menyejahterakan rakyat melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial (Hadiyono, 2020).

Dalam praktinya, amanat konstitusi belum sepenuhnya terselenggara secara konsekuen. Pembangunan kesejahteraan masih sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi, karena penanganan kendala pembangunan masih belum menyentuh persoalan mendasar. Hal ini dapat dirujuk dari berbagai indikator pembangunan, antara lain

kurangnya infrastruktur fisik, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya (Rahman, 2018).

Sebagai sebuah cita-cita, kesejahteraan bisa berjalan baik dan teratur tanpa ketimpangan jika memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara dalam mengakses haknya (Hasan, 2024). Dari kenyataan tersebut, kesejahteraan bukan hasil program ekonomi dan kebijakan sosial semata, tapi tumbuh dari persatuan, legitimasi sosial, kepercayaan publik, dan kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa.

Bertolak dari paparan tersebut, penelitian yang membahas negara kesejahteraan sudah banyak dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, namun yang berkenaan langsung dengan relasi antara kebangsaan dengan cita-cita mewujudkan negara kesejahteraan dalam konteks komunikasi masih sangat langka. Sehingga penelitian ini ingin mencari pola-pola komunikasi yang terjadi antara kebangsaan dengan cita-cita mewujudkan negara kesejahteraan,

TINJUAN PUSTAKA

Komunikasi merujuk pada kegiatan yang berkenaan dengan aktivitas pertukaran ide dan gagasan. Secara paradigmatik, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung (komunikasi tatap muka) maupun tidak langsung (komunikasi melalui media) (Nurhadi & Kurniawan, 2017). Komunikasi juga terjadi di berbagai level dengan bentuk pesan yang dipertukarkan sesuai dengan tujuan komunikasi.

Pada level bangsa, komunikasi terjadi berkenaan dengan upaya memperkuat kesatuan bangsa. Bahkan bisa juga untuk menyatukan unsur dalam sebuah negara. Kebutuhan untuk saling memperkuat antara satu sama lain agar persatuan semakin kokoh. Kebangsaan yang merujuk pada kesadaran, perasaan memiliki, serta komitmen moral dan politik terhadap komunitas bangsa merupakan identitas yang dibentuk melalui pengalaman sejarah bersama, nilai yang sama, dan tekad untuk mencapai tujuan kolektif (Syafira Adelia et al., 2023).

Kebangsaan adalah kesadaran kolektif yang tumbuh dari pengalaman hidup bersama dalam suatu komunitas yang diikat oleh sejarah budaya, nilai-nilai, dan tujuan masa depan yang sama (Hartoyo, 2010). Kebangsaan bukan hanya konsep politik tentang wilayah atau pemerintahan tetapi merupakan rasa memiliki yang muncul dari hubungan batin antar-warga yang merasa menjadi bagian dari satu kesatuan hidup. Kesadaran kebangsaan lahir ketika individu memaknai dirinya sebagai anggota dari suatu bangsa yang memiliki identitas bersama dan komitmen untuk menjaga serta mengembangkan kehidupan bersama itu (Suhaida, 2015).

Tercakup di dalamnya pemahaman tentang identitas diri sebagai bagian dari komunitas nasional yang dibentuk melalui perjalanan sejarah pengalaman sosial bahasa tradisi dan simbol-simbol bersama. Identitas ini menjadi dasar bagi rasa kedekatan dan solidaritas antar-anggota masyarakat meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Kebangsaan tidak menghapus keberagaman tetapi menyatukannya dalam ruang nilai yang disepakati bersama. Dalam konteks kehidupan bernegara kebangsaan berarti adanya hubungan timbal balik antara warga dan negara. Warga negara memiliki kesetiaan dan komitmen untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa sedangkan negara berkewajiban melindungi hak-hak warga serta menyediakan kondisi kehidupan yang adil aman dan sejahtera (Ahmad Cerdas & Afandi, 2019).

Hubungan ini tidak hanya bersifat formal tetapi lahir dari kepercayaan dan pengalaman sosial yang membentuk rasa kebersamaan yang mengandung dimensi moral yaitu pengakuan bahwa setiap individu dalam suatu bangsa memiliki martabat hak dan peran yang penting dalam kehidupan kolektif. Dimensi moral ini menumbuhkan sikap menghargai sesama menjaga harmoni sosial dan menempatkan kepentingan bersama sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi.

Kebangsaan mencerminkan cita-cita dan orientasi masa depan yang dibangun bersama. Bangsa tidak hanya mengingat masa lalu tetapi juga bergerak menuju tujuan kolektif seperti keadilan kemajuan dan kesejahteraan. Dengan demikian kebangsaan menjadi kekuatan yang

menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan. Kesejahteraan pada dasarnya merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sehingga ia dapat hidup layak, bermartabat, dan mampu mengembangkan potensi dirinya (Wartoyo, 2023). Konsep ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, psikologis, dan kualitas hidup secara menyeluruh.

Kesejahteraan merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki kapabilitas, yaitu kebebasan substantif untuk melakukan hal-hal yang bernilai. Dengan demikian kesejahteraan bukan sekadar pendapatan, tetapi akses terhadap pendidikan, kesehatan, kebebasan politik, kesempatan ekonomi, dan kemampuan hidup yang bermakna. Dalam pandangan ini, usaha-usaha kesejahteraan harus melibatkan negara sebagai penyelenggara berbagai fasilitas bagi kehidupan masyarakat. Negara dengan berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita seluruh masyarakat dapat membentuk pada wujud negara kesejahteraan.

Wujud dari itu semua adalah adanya jaminan hak dasar warga melalui intervensi sosial, perlindungan, dan pemerataan pembangunan. Kebangsaan menjadi perekat sosial yang memungkinkan terciptanya keadilan distributif dalam menjalankan upaya-upaya kesejahteraan. Gagasan tentang Negara Kesejahteraan lahir sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens* (Hasan, 2024).

Harold Laski menyatakan bahwa negara kesejahteraan merupakan negara yang memastikan setiap orang memperoleh kesempatan untuk hidup layak dan mengembangkan potensinya. Negara memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah kesengsaraan sosial dan menyediakan bantuan bagi warga yang rentan (Thohari, 2005).

Negara kesejahteraan dalam pandangan TH Marshall lahir dari perkembangan konsep kewarganegaraan modern yang mencakup hak sipil, hak politik, dan hak sosial (Thohir et al., 2022). Hak sosial inilah yang menjadi dasar negara kesejahteraan, yaitu bahwa setiap warga berhak atas jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta standar hidup minimum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam memahami kondisi yang terus berkembang, paradigma yang digunakan adalah interpretif dengan fokus pada pemahaman makna sosial dan praktik komunikasi kebangsaan. Metode kualitatif digunakan karena topik bersifat subjektif, kontekstual, dan norma-norma serta wacana penting. Menurut Creswell (2008), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pengumpulan data sebagian besar terdiri dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya) (Sutikno & Hadisaputra, 2020).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini diarahkan untuk memperoleh data. Untuk kemudian data-data yang sudah terkumpul tersebut sebagai basis analisis untuk menghasilkan temuan tertentu. Dalam penelitian ini, data yang dicari dan dikumpulkan bersumber dari media berjangkauan internet dan berasal dari dokumen-dokumen yang mendukung pada proses analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

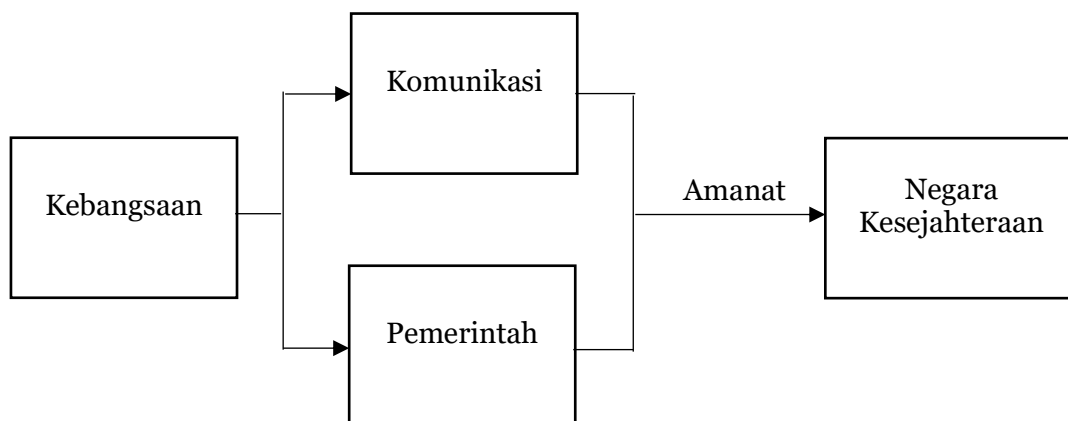
Hubungan timbal balik antara relasi kebangsaan dengan kesejahteraan sosial terjadi karena komunikasi. Kebangsaan sebagai identitas kolektif dan menjadi ciri dari komunitas tertentu saling berkomunikasi dalam menentukan cita-cita bersama. Arah negara juga dapat ditentukan berdasarkan hasil dari komunikasi yang melibatkan seluruh unsur bangsa

berdasarkan pada kenyataan empiris. Cita-cita yang terkandung sebagai amanat konstitusi mengarah pada wujud negara kesejahteraan.

Idealisasi peran, hak dan kewajiban, serta fungsi negara untuk memberikan ruang besar bagi seluruh warga untuk menyatakan dan memenuhi segala kebutuhannya, memperkuat posisi kebangsaan dalam menyelenggarakan sistem distribusi yang rata, adil, dan proporsional dalam gerak pembangunan. Sistem fasilitasi negara akan menjadikan warga dihargai dan disejahterakan.

Peran dari seluruh unsur kebangsaan makin memperkuat legitimasi negara dalam melaksanakan fungsi kesejahteraan. Ini karena warga memahami bahwa negara merupakan instrumen kolektif untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kebangsaan menyediakan landasan moral bagi negara untuk melahirkan kebijakan kesejahteraan. Ketika warga negara merasa terikat dalam satu identitas nasional, maka dukungan terhadap redistribusi sumber daya, jaminan sosial, dan perlindungan publik menjadi lebih kuat (Faudillah et al., 2023). Negara kesejahteraan pada dasarnya merujuk pada model negara yang menjadikan pemenuhan kesejahteraan bagi seluruh warganya sebagai salah satu fungsi utama dari negara.

Dalam praktiknya, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjalankan fungsi tanggung jawabnya dalam segala penyediaan layanan publik, jaminan sosial, dan pemerataan kesempatan hidup. Akan tetapi semua itu dapat terlaksana dan mendapat dukungan warga jika sudah menjadi pengetahuan bersama. Pengetahuan warga diperoleh ketika informasi tentang rencana pembangunan dan keinginan pencapaian cita-cita bersama melalui komunikasi. Dalam prosesnya, komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan ketika penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah menyampaikan rencana-rencana pembangunan ke hadapan publik, sedangkan pada proses komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantaraan media. Pola relasional kebangsaan dengan negara kebangsaan dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1
Relasi kebangsaan dengan negara kesejahteraan

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa kebangsaan sebagai entitas kolektif dapat menyatakan cita-citanya dengan membuka selebar-lebarnya kran komunikasi. Kebangsaan yang dapat disimbolisasikan pada pemerintah kemudian mengomunikasikan desain dan arah bangsa menuju perwujudan cita-cita negara kesejahteraan. Cita-cita mewujudkan negara kesejahteraan harus terlaksana karena merupakan amanat konstitusi yang harus bersifat mengikat.

Pada periode kepemimpinan saat ini, wujud negara kesejahteraan sedang mendekati pada bentuknya. Pernyataan secara terbuka dengan eksposur yang sangat luas ini bukan sekadar retorika yang tujuannya hanya menyenangkan masyarakat sesaat. Akan tetapi, sebagai wujud nyata pada cita-cita kesejahteraan yang didekati melalui berbagai program dan kebijakan yang langsung mengarah kepada keterlibatan rakyat. Sekat-sekat yang menghalangi tersingkap dengan jelas, hambatan-hambatan yang merintang jalan lapang menuju negara kesejahteraan ditertibkan.

Pembangunan sedang dalam treknya. Meski menuju pada cita ideal negara kesejahteraan tidak bisa langsung dilaksanakan secara cepat, namun percepatan tengah bereskalasi yang menunjukkan bahwa dalam periodisasi kepemimpinan saat ini rupa kesejahteraan yang dinisbatkan pada negara dapat terbentuk. Komitmen kuat yang tercetus dari penyelenggara negara sebagai bentuk konsistensi yang tidak dapat dihentikan karena alasan-alasan tertentu. Sebaliknya, berbagai faktor yang menghambat ditetapkan dalam agenda reformasi yang kemudian ditetapkan dalam penyelesaian yang tuntas.

Kerja besar melakukan penertiban dalam mengembalikan keadilan agar berpihak kepada rakyat, memerlukan komitmen yang kukuh. Syarat utama terletak pada pemimpin yang tegas, berwibawa, dan tegak lurus pada rakyat. Tanpa syarat ini, kemajuan dan keadilan pembangunan yang mengarah pada wujud negara kesejahteraan tidak akan pernah tercapai. Realitas membuktikan bahwa perjalanan panjang menuju keindonesiaan kerap kali menemui hambatan. Praktik tercela yang menggagalkan wujud kebangsaan Indonesia bukan saja bersumber dari kalangan eksternal, namun berasal dari lingkungan internal yang berusaha memanfaatkan sumber daya bagi kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya.

Sudah terlalu lama bangsa ini dikuasai sekelompok orang. Ditentukan kalangan oligarkhi yang berkonspirasi dengan pemilik kekuasaan. Bangsa ini juga sudah terlalu lelah mendapati kenyataan bahwa pemerintahan sebelumnya memberikan hak kuasa penuh kepada *client corporate* untuk mengeksplorasi sumber alam dan sumber daya manusia sekaligus. Aliran sumber kekayaan dikuasai dan dikelola untuk sebesar-besarnya keuntungan bagi mereka dengan distribusi yang melingkar pada pemenuhan kepentingannya saja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa negara hanya berfungsi sebagai fasilitator saja. Tidak hadir dalam upaya-upaya penyelenggaraan sistem sosial bagi kesejahteraan rakyat. Namun hanya sebagai penyedia saja yang kemudian dilakukan para klient. Sehingga fasilitas yang diberikannya hanya tertuju pada kalangan dekat dan tertentu saja. Tidak memberikan peluang bagi tumbuh berkembangnya para aktor kesejahteraan baru yang berkomitmen pada perwujudan kesejahteraan rakyat.

Informasi mengenai praktik tercela penyelenggara negara atas dasar konspirasi antara kekuasaan dengan agen di bawahnya sengaja dibuat tertutup. Sifat tertutupnya sebagai tawaran menggiurkan kepada media. Akibatnya, media sebagai penyampai informasi dibuat tak berdaya, karena ketidakberdayaan sebagai konsekuensi dari kesetiaan dan loyalitas yang ditunjukkan kepada kekuasaan. Akan tetapi, pembungkaman pada media menunjukkan sifat ketidaktahuan kekuasaan pada perkembangan media. Meskipun dapat menguasai beberapa media, namun tidak mampu mengontrol media secara keseluruhan.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam era digital tidak mampu melawan keterbukaan. Pada sifatnya yang personal, media digital akan terus mencari dan menginformasikan berbagai hal yang terutama berkenaan dengan cacat dan cela penyelenggaraan pemerintahan. Atas nama kebenaran, media berhadapan-hadapan dengan praktik zalim walaupun dengan konsekuensi yang sangat berat. Sebagai sarana komunikasi,

media menentukan kebenaran di atas landasan objektif dengan penafsiran yang menguatkan pada pemahaman yang sebenarnya.

Pada era kepemimpinan sebagaimana tergambar dari paparan tersebut, dan periode pemerintahan sebelumnya, kesejahteraan menjadi kata yang sangat jarang dikomunikasikan. Kesejahteraan tersembunyi di balik kepentingan dan kekuasaan kelompoknya saja. Terbagi hanya kepada mereka, dengan peluang sejahtera yang lebih besar mengubah kondisi ekonomi dan menggelembungkan kekayaannya. Dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan seperti ini, tidak terkomunikasikan rencana dan arah negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama. Sebagai pemegang kekuasaan negara dipastikan paham mengenai aturan dan konstitusi yang mengamanatkan pada tujuan-tujuan pencapaian kesejahteraan umum, namun tidak memedulikannya.

Praktik komunikasi yang dilakukannya hanya sebagai penafsir kebenaran menurut versi dirinya saja. Dengan kata lain, segala hal yang diselenggarakannya telah memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Meskipun masyarakat yang diwakilinya hanya terdiri dari para pendukung dan loyalisnya saja, bukan masarakat secara keseluruhan. Mayoritas merasa terteror ketika menyatakan kebenaran atas distribusi yang tidak merata, kesempatan berusaha yang tertutup, dan akses pada pemenuhan unsur-unsur dasar tidak tersedia, sehingga yang tersedia hanya ketakutan saja. Akan tetapi era ini berakhir dan berganti pada era yang memenuhi syarat dan memiliki jiwa kebangsaan yang kukuh.

Secara lugas dan terus terang menyatakan bahwa, pemerintahan di bawah Prabowo akan menjalankan amanah konstitusi dari melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat. Pernyataan yang terus ditegaskan ini menunjukkan tekad bangsa menuju pada wujud dan cita-cita kesejahteraan masyarakat. Prabowo memahami bahwa Landasan utamanya adalah pasal 33 UUD 1945 yang menggariskan arah pembangunan nasional demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 sebagai Landasan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat

Oleh Humas | Dipublikasikan pada 24 Juli 2025 | Kategori Berita | Dibaca: 11.528 Kali



Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025. (Foto: SP4M Setkab)

Sumber: setkab.go.id

Gambar 2,
Presiden Republik Indonesia berkomitmen menyejahterakan bangsa

Pernyataan yang menegaskan tekad menuju arah bangsa ini merepresentasikan kinerja pemerintah di bawah Prabowo dalam menjalankan amanat konstitusi yang salah satunya mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagai amanat yang diimplementasikan melalui agenda pembangunan melalui delapan program prioritas (Astacita). Ini mengindikasikan bangsa menuju pada pelaksanaan prinsip-prinsip negara kesejahteraan. Komitmen mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara dilandasi pasal 33 UUD 1945 yang mengatur dasar perekonomian nasional dan demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, gotong royong, dan cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Ungkapan ini dinyatakan dalam komunikasi di lingkup kebangsaan. Di dalamnya menyertakan penyampaian nilai, identitas, visi kolektif, serta semangat persatuan yang membentuk kesadaran sebagai satu bangsa. Komunikasi ini berlangsung melalui pendidikan, media, wacana publik, praktik budaya, kebijakan negara, dan interaksi sosial sehari-hari.

Relasi kebangsaan dengan negara kesejahteraan muncul karena nilai-nilai nasionalitas memberikan landasan moral dan psikologis bagi pembentukan sistem yang bertujuan menjamin kesejahteraan seluruh warga. Negara kesejahteraan menuntut adanya solidaritas sosial, rasa saling peduli, dan kesediaan untuk menerima kebijakan redistribusi demi kepentingan bersama. Semua itu hanya dapat tumbuh jika masyarakat memiliki pemahaman kebangsaan yang kuat, yakni pemahaman bahwa kesejahteraan setiap individu adalah bagian dari kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.

Komunikasi kebangsaan membantu membentuk opini publik mengenai arah pembangunan dan fungsi negara, sehingga masyarakat tidak melihat kebijakan kesejahteraan sekadar sebagai program administratif, melainkan sebagai perwujudan dari cita-cita kebangsaan yang diamanatkan bersama.

KESIMPULAN

Komunikasi kebangsaan menjadi ruang terbuka bagi ide-ide dan pemikiran tentang negara kesejahteraan dibangun. Terjadi dialog antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan mengenai wujud kesejahteraan, makna keadilan, dan negara dalam menjalankan amanat konstitusional. Komunikasi memastikan bahwa negara kesejahteraan tidak hanya menjadi konsep struktural, tetapi juga dipahami, diterima, dan diperjuangkan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas kebangsaan. Komunikasi sebagai proses yang membangun, memperkuat, dan menyebarkan pemahaman kolektif tentang identitas nasional serta tujuan kesejahteraan sebagai cita-cita bersama. Konsep ini menempatkan komunikasi sebagai jantung dari bagaimana sebuah bangsa memaknai dirinya dan bagaimana negara dirancang untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.

Relasi kebangsaan dengan negara kesejahteraan muncul karena keduanya saling bertumpu pada solidaritas sosial. Negara kesejahteraan membutuhkan kesediaan masyarakat untuk saling menopang melalui kebijakan redistribusi, perlindungan sosial, dan penyediaan layanan dasar. Kesediaan ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui narasi kebangsaan yang menekankan kesetaraan, persaudaraan, kepedulian, dan tanggung jawab moral antarwarga. Dengan komunikasi kebangsaan dapat memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tersampaikan dan dipahami dalam membantu membentuk opini publik mengenai makna kesejahteraan sebagai tujuan konstitusional dan sebagai hak setiap warga negara. Melalui komunikasi yang efektif, kesejahteraan tidak dipandang sebagai program semata tetapi sebagai cita-cita yang menyatu dalam identitas nasional. Komunikasi kebangsaan juga memperkuat legitimasi bagi negara untuk menjalankan fungsi kesejahteraan karena publik memahami bahwa tindakan negara diarahkan untuk kebaikan bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan diterbitkannya artikel jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para pengelola jurnal JKRI atas kesempatannya mempublikasikan pemikiran kami. JKRI telah memberi space yang luas sehingga kami dapat menyalurkannya secara tepat, terima kasih

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Cerdas, F., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *SASI*, 25(1), 72–83.
- Enita Puspita Sari, M., & Ayu Pratiwi, D. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137–152.
- Faudillah, A. N., Husna, F., & Makhfiroh, N. R. (2023). IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI BANGSA. *AMI, Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 1(1), 1–12.
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami>.
- Ginting, N. M., Putri, A., Jannati, R., & Manik, R. E. (2025). Implementasi Indonesia menuju Negara Kesejahteraan melalui Perlindungan Pekerja Anak berdasarkan Perpres Stranas BHAM. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.32734/nlrjloi.v4i1.16728>
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23–33.
<http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk23>
- Hartoyo, H. A. (2010). MENGGUGAH KESADARAN NASIONAL MEMPENGARUHI KEBHINEKAAN INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 1(2), 132–146.
- Hasan, R. (2024). DINAMIKA KONSEP WELFARE STATE DI INDONESIA : ANTARA JANJI KONSTITUSI DAN KENYATAAN EKONOMI. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–19. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Libra, R., & Fauzan, M. (2023). Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1), 39–49. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2017). KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS PESAN DALAM KOMUNIKASI. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 3(1), 90–95.
- Pambudi, W. (2018). SAKRALISASI PEMBUKAAN UUD 1945. *Istoria*, 4(1), 1–12.
- Rahman, A. (2018). IDENTIFIKASI STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Siregar, A. R. S., Lubis, N. H., Isfa, F., & Muzayyana. (2025). Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 51–64.
<https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i4.3424>
- Suhaida, D. (2015). THE ROLE OF CITIZENSHIP EDUCATION ON STRENGTHENING NATIONAL ANTHEM OF COMMITMENT TO THE COMMUNITY CHINESE ETHNIC PONTIANAK. *Jurnal Civicus*, 15(2), 1–17.

- Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif, Mengurai Seputar Apa dan Bagaimana Cara Praktis Menulis dan Melakukan Penelitian Kualitatif secara Benar dari A sampai Z* (Nurleli, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Holistica.
<https://www.researchgate.net/publication/353587963>
- Syafira Adelia, D., Alfiyah Damanik, D., Fadilah Br Batu Bara, N., & Hayirani Lbs, W. (2023). Ruang Lingkup Identitas Nasional. *AMI, Jurnal Pendidikan Dan RRset*, 1(2), 64–72.
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami>
- Syahrin, M. A., Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2022). KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 95–105.
- Thohari, A. A. (2005). KONSEPTUALISASI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: UPAYA MENUJU NEGARA YANG DICITA-CITAKAN. *Lex Jurnalica*, 3(1), 39–48.
- Thohir, M. A., Apolinaris, T., & Suryadinata. (2022). PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM KONFLIK RUANG DI PERKOTAAN (Studi Kasus Masyarakat Kentingan Baru, Surakarta). *Journal of Development and Sosial Change*, 5(1), 11–24.
<https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>
- Wartoyo. (2023). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: CASE STUDY DI INDONESIA. *Repository UIN Siber Syeck Nurjati Cirebon*.
- Zakiah, K., & Widiastuti, T. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1).

Media:

<https://economy.okezone.com/read/2025/11/21/320/3185045/1-persen-orang-terkaya-kuasai-hampir-separuh-kekayaan-indonesia-siapa-mereka>